



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN
(LKJIP)
TAHUN 2023**

PEMERINTAH KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014



tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara keseluruhan LKjIP tahun 2023 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD sesuai Renstra tahun 2021-2026 telah dilaksanakan dengan baik. Meskipun demikian, kami menyadari masih terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi dan ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga kita dapat mewujudkan visi, misi, dan sasaran yang ingin dicapai melalui program dan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan Renstra Perubahan Kecamatan Muara Badak Hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government.

Pada akhirnya laporan ini kiranya dapat memberi manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja dimasa mendatang dan memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi khususnya Kecamatan Muara Badak Semoga LKjIP Kecamatan Muara Badak ini juga dapat berguna sebagaimana mestinya.

Muara Badak, Februari 2024
Camat Muara Badak

ARPAN, S.Sos
Nip. 196806121988031007



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance). Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis suatu organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur dan dapat diujikan diandalkan.

Berdasarkan saran dan arahan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Suatu indikator kinerja tidak selalu menjelaskan keadaan secara keseluruhan, tetapi kerap kali hanya memberi petunjuk (indikasi) tentang keadaan secara keseluruhan tersebut sebagai suatu perkiraan. Dapat dikatakan indikator bukanlah ukuran yang tetap, melainkan indikasi dari keadaan yang disepakati bersama oleh anggota organisasi yang akan dijadikan sebagai alat ukur. Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKjIP ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	70	100	142.86%
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71	100	140.85%
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	76.73	80.77%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	74	74	100.00%
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100.00%
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	6	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100.00%
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabel Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak	7	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100.00%
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	8	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00%
		9	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00%
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	10	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	60	66.9	111.50%
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	11	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100.00%
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	12	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00%
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang kemiskinan di wilayahnya.	13	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	98.92	98.92%
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	14	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	99	99.00%
		15	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	94.35	94.35%
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	16	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100.00%



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

12	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	17	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100.00%
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	18	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	3	75.00%
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	19	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100.00%
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	20	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4	0.29	72.50%
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	21	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5	15.31	92.79%
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	22	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	4	25%
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	23	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	97.17	215.93%
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	24	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100.00%
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	25	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	10	10.00%
							98.38%



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan Kecamatan Muara Badak	3
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Badak Tahun 2022	4
Tabel 1.3	Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Kecamatan Muara Badak	5
Tabel 1.4	PNS berdasarkan Pendidikan	7
Tabel 1.5	PNS berdasarkan Golongan	7
Tabel 1.6	PNS berdasarkan Eselon	7
Tabel 1.7	PNS berdasarkan Jabatan	8
Tabel 1.8	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.....	12
Tabel 1.9	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026.....	13
Tabel 2.0	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara badak	14
Tabel 2.1	Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2022	17
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022.....	22
Tabel 2.3	Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2022	22
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2022.....	22
Tabel 2.5	Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2022.....	23
Tabel 2.6	Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022.....	23
Tabel 2.7	Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2022...	31
Tabel 2.8	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti.....	34
Tabel 2.9	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2022.	35
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum.....	35
Tabel 3.11	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2022.....	36



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Tabel 3.12	Pengukuran Kinerja dengan indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	36
Tabel 3.13	Realisasi Indikator Sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Tahun 2022	37
Tabel 3.14	Pengukuran Kinerja dengan indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	37
Tabel 3.15	Realisasi Indikator Sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Tahun 2022.....	38
Tabel 3.16	Pengukuran Kinerja dengan indikator Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah.....	39
Tabel 3.17	Realisasi Indikator Sasaran Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah Tahun 2022.....	39
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja dengan indikator Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja.....	40
Tabel 3.19	Realisasi Indikator Sasaran Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja Tahun 2022.....	40
Tabel 3.20	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran.....	41
Tabel 3.21	Realisasi Indikator Sasaran Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran.....	41
Tabel 3.22	Pengukuran Kinerja dengan indikator Pengamanan Bidang Tanah.....	42
Tabel 3.23	Realisasi Indikator Sasaran Pengamanan Bidang Tanah.....	42
Tabel 3.24	Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022).....	43
Tabel 3.25	Realisasi Indikator Sasaran Persentase ketepatan Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022).....	44
Tabel 3.26	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022.....	45
Tabel 3.27	Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022.....	45
Tabel 3.28	Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal	46



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	31 Maret 2022.....	
Tabel 3.29	Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022.....	46
Tabel 3.30	Pengukuran Kinerja dengan indikator Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.....	47
Tabel 3.31	Realisasi Indikator Sasaran Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah.....	47
Tabel 3.32	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar.....	48
Tabel 3.33	Realisasi Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar.....	48
Tabel 3.34	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.....	49
Tabel 3.35	Realisasi Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.....	49
Tabel 3.36	Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.....	50
Tabel 3.37	Realisasi Melakukan Pengendalian terhadap verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta berkoordinasi dalam rangka penurunan angka kemiskinan di wilayahnya.....	51
Tabel 3.38	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang.....	52
Tabel 3.39	Program dan Anggaran Sasaran Tahun 2022.....	52
Tabel 3.40	Program dan Anggaran Sasaran Tahun 2022.....	53
Tabel 3.41	Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021.....	54
Tabel 3.42	Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2022.....	57
Tabel 3.43	Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	58
Tabel 4.1	Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2022.....	65
Tabel 4.2	Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	68



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistemik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Rangkaian sistemik tersebut meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Kecamatan Muara Badak dalam menyelenggarakan SAKIP telah menyusun:

- (1) Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026;
- (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan Muara Badak Tahun 2023;
- (3) Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2023; dan
- (4) Perjanjian Kinerja (PK) Camat Muara Badak Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi perangkat daerah diwajibkan menyusun laporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah



pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Badak
2. Mendorong Kecamatan Muara Badak di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Badak untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

B. Gambaran Umum

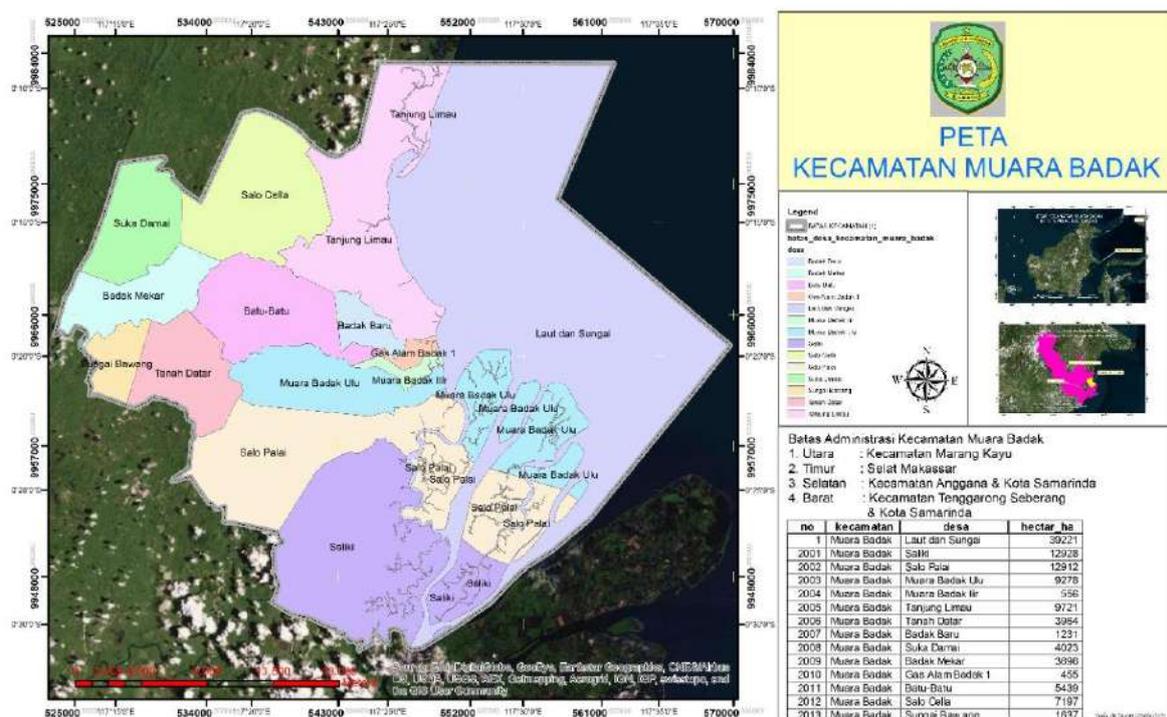
Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan kecenderungan potensi ekonomi pada pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan

Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai dan Muara Wis, kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan, sedangkan ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa dan Samboja.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Kecamatan Muara Badak masuk dalam Zona Pesisir yang terletak diantara 115°26'28" Bujur Timur/Longitude East 117°36'43" Bujur Timur/Longitude East 1°28'21" Lintang Utara/Latitude North 1°08' 06" Lintang Selatan/Latitude South. Kecamatan Muara Badak secara administratif berbatasan dengan, Sebelah Utara: Kecamatan Marangkayu Sebelah Timur: Selat Makassar Sebelah Selatan: Kecamatan Anggana dan Kota Madya Samarinda Sebelah Barat: Kecamatan Tenggarong Seberang dan Kota Madya Samarinda



Luas Kecamatan Muara Badak **63.425 Ha**, Secara administratif Kecamatan **Muara Badak** terdiri atas 13 Desa

Dengan luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Badak sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas wilayah Desa di Kecamatan Muara Badak

No	Nama Desa	Luas Wilayah Desa (Ha)	Jumlah RT	Dusun
1	Saliki	12.928	10	2
2	Salo Palai	12.912	9	2
3	Muara Badak Ulu	10.212	14	2
4	Muara Badak Ilir	556	14	1



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

5	Tanjung Limau	9.721	17	2
6	Badak Baru	1.231	30	2
7	Tanah Datar	3.964	13	2
8	Badak Mekar	3.362	11	2
9	Suka Damai	4.023	11	2
10	Gas Alam Badak I	455	28	2
11	Batu Batu	5.439	6	1
12	Sungai Bawang	1.637	5	-
13	Salo Cella	7.197	12	3
TOTAL		63.425	180	23

Sumber Data: Pemerintahan Kecamatan Muara Badak

Jumlah penduduk mencapai 47.957 jiwa (data Bagian Pemerintahan Kecamatan Muara Badak Tahun 2023),

Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

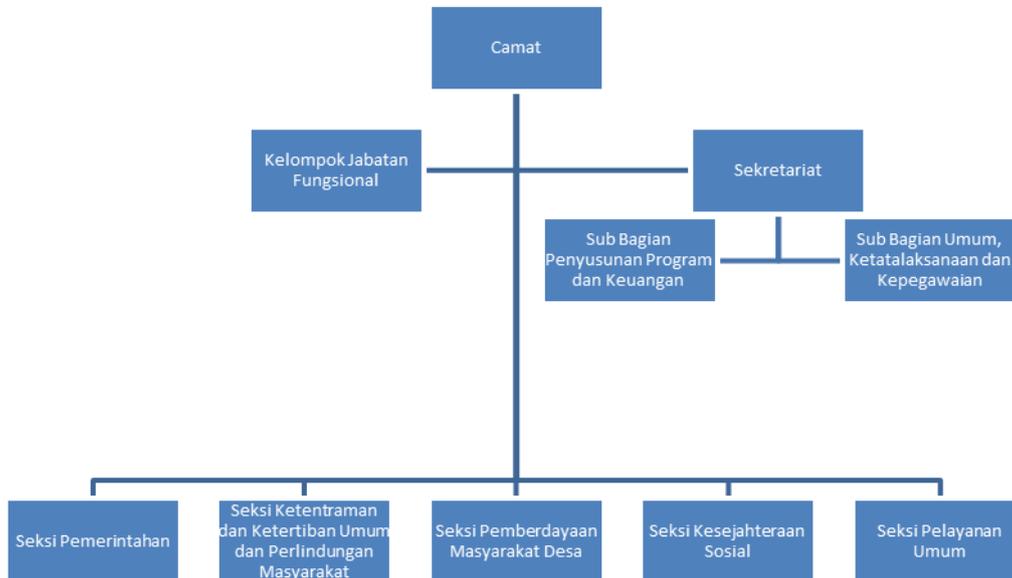
NO.	NAMA DESA/ KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	L + P
1	Saliki	3.053	2.107	5.164
2	Salo Palai	1.047	928	1.975
3	Muaara Badak Ulu	2.577	2.497	5.074
4	Muara Badak Ilir	3.074	2.123	5.197
5	Tanjung Limau	2.308	2.486	4.794
6	Badak Baru	4.509	4.470	8.979
7	Tanah Datar	1.470	1.314	2.784
8	Badak Mekar	738	632	1.370
9	Suka Damai	809	694	1.503
10	Gas Alam Badak I	2.841	2.604	5.455
11	Batu Batu	1.044	827	1.871
12	Sungai Bawang	754	891	1.645
13	Salo Cella	1.096	1.060	2.156
JUMLAH		25.320	22.633	47.957

Sumber Data: Bagian Pemerintahan Kecamatan Muara Badak



C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Pembentukan Kecamatan Muara Badak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan struktur organisasi diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Kecamatan, kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat; Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perangkat kecamatan terdiri dari:

1. Sekretariat,
 - a. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
2. Seksi Pemerintahan;
3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Seksi Kesejahteraan Sosial;



6. Seksi Pelayanan Umum;

D. Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh seorang Camat. Camat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Camat melaksanakan tugas dan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

E. Sumber Daya Aparatur

Sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan Muara Badak per 31 Desember 2022 sebanyak 25 orang. Perincian jumlah tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Pendidikan



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Tabel 1.4. PNS berdasarkan Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	SLTA	6	5	11	44 %
2	D-III	1	0	1	4 %
3	S1	6	5	11	44 %
4	S2	0	2	2	8 %
Jumlah		13	12	25	100 %

b. Berdasarkan Golongan

Tabel 1.5. PNS berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II	6	4	10	40 %
2	III	6	6	12	48 %
3	IV	1	2	3	12 %
Jumlah		14	12	25	100 %

c. Berdasarkan Eselon

Tabel 1.6. PNS berdasarkan Eselon

No.	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
1	II.a	0	0	0	0.00%
2	II.b	0	0	0	0.00%
3	III.a	0	0	0	0.00%
4	III.b	1	0	1	11.11%
5	IV.a	0	1	1	11.11%
6	IV.b	3	4	7	77.78%
Jumlah		4	5	9	100%

d. Berdasarkan Jenis Jabatan

Tabel 1.7. PNS berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Proporsi
-----	---------------	-----------	-----------	--------	----------



1	Struktural	4	5	9	36.00%
2	Pelaksana	9	7	16	64.00%
Jumlah		13	12	25	100%

F. Sumber Daya Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak pada Tahun 2023 berasal dari APBD Pemerintah Daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Muara Badak mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 19.082.481.155 yang diperuntukkan untuk belanja langsung dan belanja tak langsung serta untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program pendukung dengan rincian 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) kegiatan dan 35 (Tiga lima) sub kegiatan.

G. Isu Strategis

Memperhatikan isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 -2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, 7 (tujuh) Isu strategis Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Dukungan persiapan pembangunan IKN
2. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik, cepat, mudahm murah dan bermutu
3. Pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia
4. Optimalisasi potensi ekonomi daerah
5. Penataan infrastruktur daerah yang terintegrasi antara spasial dan fungsional
6. Pengelolaan sumber daya alam berbasis lingkungan



7. Percepatan pembangunan wilayah desa dan kecamatan

Berdasarkan hasil analisis terhadap masalah yang timbul dari tahun – tahun sebelumnya dan berdasarkan telaah diatas maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis Pemerintah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

1. Meningkatkan urusan pemberdayaan masyarakat.
2. Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Meningkatkan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati
4. Meningkatkan pemeliharaan prasarana dan layanan umum
5. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan perangkat daerah di tingkat Kecamatan.
7. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.



H. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Ikhtisar Eksekutif

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bab IV Penutup Lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Kinerja

Setiap instansi pemerintah menyusun dokumen perencanaan sebagai landasan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Muara Badak merupakan dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang didalamnya menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta sub kegiatan pembangunan pada Kecamatan Muara Badak yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Kecamatan Muara Badak telah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026, Renstra perubahan ini didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana strategis yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta adanya penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Visi dan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 **“Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan”**.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021, Misi pembangunan sebagai berikut :

1. Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat;
2. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkompeten;
3. Meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan pertanian dan pariwisata untuk percepatan transformasi struktur ekonomi daerah;



5. Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur menuju daya saing daerah;
6. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
7. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan serta penguatan perlindungan anak.

Selanjutnya visi misi tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bagan alir Cascade RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026. Dalam hal ini Kecamatan Muara Badak mengampu **Misi pertama** yang terlihat pada tabel 1.8 sebagai berikut:

Tabel 1.8. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026

No	Misi	Tujuan Pemda	Indikator Tujuan Pemda	Sasaran Pemda	Insikator Sasaran
1.	Memantapkan reformasi birokrasi untuk rakyat	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Indeks Kepuasan Pelayanan Kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa
					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan
					Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah



Berangkat dari Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah tersebut dan sesuai tugas dan pokok fungsinya, Kecamatan Muara Badak berupaya mendukung pencapaian Sasaran Pemerintah Daerah yaitu:

- Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan dengan indikator Predikat Akuntabilitas Kinerja;
- Meningkatnya pelayanan publik pemerintahan daerah dengan indikator Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Komponen Penilaian RB);
- Meningkatnya aksesibilitas antar dan inter wilayah dengan indikator Cakupan Aksesibilitas antar Wilayah.

2. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

a. Tujuan

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan Kecamatan Muara Badak dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun. Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka Tujuan yang relevan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Muara Badak adalah Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pembangunan, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah dan Meningkatkan Aksesibilitas antar dan inter wilayah (Kabupaten).

b. Sasaran

Berdasarkan pada Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Muara Badak, maka Sasaran yang hendak dicapai terlihat pada tabel 1.9 sebagai berikut:

Tabel 1.9. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan	Persen	60	65	70	75	80	90



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Tahunan					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		kecamatan	kecamatan yang ditindaklanjuti							
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	90	92	95	97	99	100
			Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	68	74	82	89	95
			Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)	Persen	63	65	71	74	78	80

3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rangkaian langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan perangkat daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan perangkat daerah merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Adapun strategi dan arah kebijakan Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 2.0 berikut:

Tabel 2.0 . Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Muara Badak

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatkan Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Tingkat Kecamatan
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
			Meningkatkan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
			Meningkatkan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
			Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan di Kecamatan
			Meningkatkan Fasilitas Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di daerah.
			Meningkatkan Kualitas Pembangunan Jalan, Jembatan dan pemeliharaan Jalan, Jembatan di



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Kecamatan.
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatkan Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
		Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatkan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran pada Tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1. Keterkaitan Sasaran dengan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
				Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan
				Pengadaan Mebel



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Tahunan (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	70
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	74



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	6	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabel Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak	7	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	8	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
		9	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	10	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	60
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	11	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	12	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang kemiskinan di wilayahnya.	13	Capaian Output Kegiatan	Persen	100
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	14	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100
		15	Persentase realisasi keuangan	Persen	100
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	16	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2
12	Melaksanakan reuiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	17	Dokumen Reuiu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	18	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	19	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	20	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	21	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	22	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	23	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	24	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	25	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100

C. Alokasi Anggaran Tahun 2023

Pada tahun Anggaran 2023, Kecamatan Muara Badak melaksanakan kegiatan yang bersumber dari APBD sebesar **Rp.24.547.825.236.-** Melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2023 yang bersumber dari APBD sebesar **Rp. 57.896.066.526,-** meningkat sebesar **Rp. 33.348.241.290.-**

Tabel 2.3. Alokasi Anggaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah
Alokasi Anggaran	Rp. 24.547.825.236.-	Rp. 57.896.066.526.-	Rp. 33.348.241.290.-

1. Alokasi Anggaran Belanja

Perencanaan pelaksanaan anggaran belanja dan setelah perubahan anggaran belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 dengan rincian pada tabel berikut ini:



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Belanja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Belanja Operasi	Rp. 15.728.000.008.-	Rp. 53.469.011.392.-	Rp. 2.650.850.094.-
Belanja Modal	Rp. 34.916.000.-	Rp. 4.427.055.134.-	Rp. 668.715.053.-
Total	Rp. 15.762.916.008.-	Rp. 57.896.066.526.-	Rp. 3.319.565.147.-

2. Alokasi Anggaran per Sasaran Perencanaan pelaksanaan anggaran Tahun 2023, Kecamatan Muara Badak mengalokasikan anggaran berdasarkan per sasaran (IKU) sebagaimana pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5. Alokasi Anggaran per Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan	Rp 15.762.916.088	Rp. 19.082.481.155	(Rp. 523.309.902)
Total	Rp. 15.762.916.088	Rp. 19.082.481.155	Rp 3.319.565.067

1. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023 merencanakan 5 (Lima) program, 12 (Dua belas) kegiatan, dan 35 (Tiga puluh lima) sub kegiatan dengan rincian pada tabel 2.6 berikut ini:

Tabel 2. 6. Alokasi Anggaran per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ (Berkurang)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,848,551,291	5,775,904,359	- 523,309,902
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174,790,000	224,790,000	50,000,000
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,000,000	25,000,000	-
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15,000,000	15,000,000	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	15,000,000	40,000,000	25,000,000
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,520,000	9,520,000	-
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,270,000	35,270,000	25,000,000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100,000,000	100,000,000	-
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,739,957,534	3,413,692,601	- 326,264,933
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,640,623,034	3,285,188,101	- 355,434,933
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	25,184,500	25,184,500	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	74,150,000	103,320,000	29,170,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65,761,100	65,761,100	
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24,961,100	24,961,100	
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	29,092,500	29,092,500	
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29,092,500	29,092,500	
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah	464,486,000	479,804,808	15,318,808
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	10,000,000	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	20,000,000	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97,289,000	97,289,000	-
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,000,000	30,000,000	-
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	32,469,000	32,469,000	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	224,728,000	224,728,000	-
7	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,000,000	65,318,808	15,318,808
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		450,662,970	450,662,970
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		450,662,970	450,662,970
VII	Penyediaan Jasa Penunjang			



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Urusan Pemerintahan Daerah	820,084,577	603,571,700	- 216,512,877
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,989,000	1,989,000	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	535,707,209	318,970,000	- 216,737,209
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,568,000	12,568,000	-
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	269,820,368	270,044,700	224,332
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	554,379,580	508,528,680	- 45,850,900
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	382,656,900	336,806,000	- 45,850,900
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,560,000	49,560,000	-
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	122,162,680	122,162,680	-
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	9,370,207,047	12,649,497,046	3,279,289,999
I	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	9,370,207,047	12,649,497,046	3,279,289,999
1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	30,400,000	30,400,000	-
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	9,339,807,047	12,619,097,046	3,279,289,999



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			
C	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	480,600,000	593,522,000	- 66,150,000
I	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	480,600,000	593,522,000	- 66,150,000
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	75,000,000	75,000,000	-
2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	72,600,000	39,525,000	- 33,075,000
3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	333,000,000	478,997,000	- 33,075,000
D	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19,754,000	19,754,000	
I	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19,754,000	19,754,000	
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19,754,000	19,754,000	-
E	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	43,803,750	43,803,750	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

I	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	43,803,750	43,803,750	-
1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22,811,250	43,803,750	-
2	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	20,992,500	20,992,500	-
Total		15.762.916.088	19.082.481.155	3.319.565.067



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan bentuk akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja diwujudkan dalam pelaporan kinerja melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya, sumber daya yang mendukung keberhasilan atau ketidakberhasilan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja.

Pelaporan kinerja Kecamatan Muara Badak Tahun 2023, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Sub bab ini akan disajikan target kinerja dalam perjanjian kinerja, pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja, capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja dengan target pembangunan jangka menengah, analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibanding dengan capaian kinerja dan analisis program dan kegiatan yang mendukung capaian target kinerja, serta di uraikan cara pengukuran kinerja, dan analisis pencapaian kinerja sasaran. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu. Kemudian dijelaskan program yang mendukung per sasaran, realisasi anggaran per sasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/ indikator kinerja.

A. Pengukuran Kinerja

Untuk mengukur persentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai



berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Capaian} = 1 + \frac{\text{Target} - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK).

Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa **skala ordinal**. Adapun skala ordinal yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini adalah sebagai berikut:

Skala Ordinal Pengukuran Sasaran		
No	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1	≥95	Sangat Berhasil
2	80 s/d <95	Berhasil
3	50 s/d <80	Cukup Berhasil
4	<50	Kurang Berhasil

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta



mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi kedepan yang perlu dilaksanakan.

Hasil pengukuran kinerja Kecamatan Muara Badak atas Perjanjian Kinerja (PK) Camat Tahun 2023 yang terdiri dari 15 sasaran, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7 Rekapitulasi Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	70	100	142.86%	SANGAT BERHASIL
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71	100	140.85%	SANGAT BERHASIL
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	76.73	80.77%	BERHASIL
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	74	74	100.00%	SANGAT BERHASIL
2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	6	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabel Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak	7	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	8	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		9	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	10	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	60	66.9	111.50%	SANGAT BERHASIL
7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	11	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	12	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00%	SANGAT BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang kemiskinan di wilayahnya.	13	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	98.92	98.92%	SANGAT BERHASIL
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	14	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	99	99.00%	SANGAT BERHASIL
		15	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	94.35	94.35%	BERHASIL
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	16	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100.00%	SANGAT BERHASIL
12	Melaksanakan reviu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	17	Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100.00%	SANGAT BERHASIL
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	18	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	3	75.00%	CUKUP BERHASIL
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	19	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	20	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4	0.29	72.50%	CUKUP BERHASIL
16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	21	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5	15.31	92.79%	BERHASIL
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	22	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	4	25%	KURANG BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	23	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	97.17	215.93%	SANGAT BERHASIL
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	24	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	25	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	10	10.00%	KURANG BERHASIL
							98.38%	SANGAT BERHASIL

Berdasarkan Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2021-2026, pada tahun 2022 Kecamatan Muara Badak memiliki 6 (Enam) sasaran dan 15 (Lima belas) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut. Namun, pada tahun 2023 ini oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menetapkan seluruh Perangkat Daerah untuk membantu memperbaiki dan meningkatkan beberapa indikator tolak ukur keberhasilan pembangunan di Kutai Kartanegara. Sehingga pada tahun 2022, Kecamatan Muara Badak memiliki 20 (Dua puluh) sasaran dan 25 (Dua Puluh Lima) indikator sasaran. Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 18 Indikator, atau 72 %;
- Capaian kinerja 80 s/d <95% kategori “berhasil” sebanyak 3 Indikator, atau 12 %;
- Capaian kinerja 50 s/d <80% kategori “cukup berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 8 %; dan
- Capaian kinerja 0 s/d < 50% kategori “kurang berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 8 %.



B. Analisis Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Analisis Kinerja Sasaran 1: “ Meningkatkan Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan”

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan** diukur dengan 5 (Lima) indikator yaitu sebagai berikut:

1.1 Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti

Rumusan dari indikator **Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8 Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Jumlah keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dibagi Total keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan x 100



Tabel 2.9. Realisasi Indikator Sasaran Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti Tahun 2023.

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan .	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	70	100	142..86

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti** tahun 2023, realisasi atas capaian kinerja indikator ini tidak ada yang ditindaklanjuti karena tidak keluhan masyarakat yang masuk

1.2 Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Rumusan dari indikator **Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10 Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kasus yang ditangani dibagi total kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan x 100



Tabel 3.11 Realisasi Indikator Sasaran Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan .	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71	100	140.85

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase Capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum** tahun 2023, realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah kinerja untuk menyelesaikan ketentraman dan ketertiban umum dengan tindak lanjut dan Kerjasama dengan pihak TNI,Polri, Tokoh Masyarakat,

1.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan” dengan indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa** mencapai **87.77 %** dan termasuk predikat “**Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.12 Pengukuran Kinerja dengan indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	$\frac{\text{Nilai Total PADes tahun berjalan (N)} - \text{Nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1)}}{\text{Nilai Total PADes tahun sebelumnya (N-1)}} \times 100$



Tabel 3.13. Realisasi Indikator Sasaran Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa Tahun 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	76.73	80.77

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Persentase Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa** tahun 2023, realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah kinerja untuk memberikan pembinaan ke pemerintahan Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, walaupun belum semua Desa memaksimalkan Padesnya terutama BUMDes, dan pemerintah Kecamatan telah mendorong untuk menggali potensi Desa dan pendampingan pengolahan Bumdes.

1.3 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan” dengan indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan** mencapai **0 %** dan termasuk predikat “ **Kurang Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14 Pengukuran Kinerja dengan indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan**



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	$\frac{\text{Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun berjalan (N)} - \text{Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1)}}{\text{Nilai Total Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya (N-1)}} \times 100$

Tabel 3.15. Realisasi Indikator Sasaran **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	60	60	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan** tahun 2022, realisasi atas capaian kinerja indikator ini karena Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tangga dan Perijinan Skala Kecil telah alihkan ke DPMPSTP Tenggarong berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

1.4 Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan” dengan indikator **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah** mencapai **66.9 %** dan termasuk predikat “ **Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Rumusan dari indikator **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.16 Pengukuran Kinerja dengan indikator **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 Nomor : NOMOR : B-1/DIARPUS/000.5.15.1/11/2023 tanggal 14 November 2023

Tabel 3.17. Realisasi Indikator Sasaran **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah	Persen	60	66.9	111.5

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Nilai Kinerja dan Tata Kelola Perangkat Daerah Tahun 2023**

realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Piagam Penghargaan Predikat Kinerja **SANGAT BERHASIL** TAHUN 2023 oleh Bupati Kutai Kartanegara tertanggal 14 November 2023.

2. Analisis Kinerja Sasaran 2 : “ Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dilaksanakan bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan terpercaya. Tolak ukur capaian sasaran **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah** yaitu sebagai berikut:



- a. **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja**

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “ **Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.**” dengan indikator **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja** mencapai **100 %** dan termasuk predikat “ **Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.18. Pengukuran Kinerja dengan indikator **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	

Tabel 3.19. Realisasi Indikator Sasaran **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja Tahun 2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100



Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja Tahun 2023**

realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Waktu Pelaksanaan Tindak lanjut dengan Dokumen **Pemberitahuan Permohonan Mutasi Aset Daerah Nomor Surat : P-892/CMB/000.2.1/11/2023** tertanggal 24 November 2023

3. Analisis Kinerja Sasaran 3 : “ Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah”

a. Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah**” dengan indikator **Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah** mencapai **100 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.20. Pengukuran Kinerja dengan indikator Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan BMD yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Hasil tindak lanjut perangkat daerah dalam menyampaikan perbaikan laporan hasil inventarisasi BMD tahun 2018-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



Tabel 3.21. Realisasi Indikator Sasaran Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan BMD yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja indikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan BMD yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah Tahun 2023

Realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah tindak lanjut perangkat daerah dalam menyampaikan perbaikan laporan hasil inventarisasi BMD tahun 2018-2019 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

4. Analisis Kinerja Sasaran 4 : “Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabelBarang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak ”

a. Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabelBarang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak mencapai 100 % dan termasuk predikat “Sangat Berhasil” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:



Rumusan dari indikator **Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabelBarang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak** terlihat pada tabel berikut ini:

- a. Tabel 3.22. Pengukuran Kinerja dengan indikator **Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah**

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	

- a. Tabel 3.23 Realisasi Indikator **Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persentase Pelaksanakan dan Pelaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100



5. Analisis Kinerja Sasaran 5 : “ Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) ”

a. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran “**Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)**” mencapai **100 %** dan termasuk predikat “**Sangat Berhasil**” sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Rumusan dari indikator terlihat pada tabel berikut ini:

a. Tabel 3.24 Pengukuran Kinerja dengan indikator Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Kepatuhan menyampaikan LHKPN pertanggal 31 maret 2023

a. Tabel 3.25. Realisasi Indikator Sasaran Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta	Persen	100	100	100



Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)Perangkat Daerah	Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)					
---	---	--	--	--	--	--

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)** realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Kepatuhan menyampaikan LHKPN pertanggal 31 maret 2023.

b. Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran **“Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)”** dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023 mencapai **100%** dan termasuk predikat **“Sangat Berhasil”** sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

- a. Rumusan dari indikator **Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023** terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.26. Pengukuran Kinerja dengan indikator Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Report Penyampaian LHKASN, data kepatuhan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)Perangkat Daerah		
---	--	--

Tabel 3.27. Realisasi Indikator Sasaran Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
				Target	Realisasi	% Capaian
1.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)Perangkat Daerah	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100

Pencapaian kinerja inidikator ini diuraikan sebagai berikut:

Target kinerja **Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023** realisasi atas capaian kinerja indikator ini adalah Waktu Pelaksanaan Tindak lanjut kepatuhan ASN **sangat baik**

Sasaran tersebut dicapai melalui Program sebagai berikut:

Tabel 3.40. Program dan Anggaran Sasaran Tahun 2023

No.	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.127.702.073	7.069.478.263	87
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.082.081.900	987.792.350.	87



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48.499,471.303	46371.394.924.	95.6
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44.000.000	38.375.000	87.72
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50.000.000	45.204.000	90.4
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92.811.250	68.020.500	73.3
TOTAL		57.896.066.526	54.580.265..037	94.3

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah Rp.54.580.265.037 dari anggaran sebesar Rp.57.896.066.526 atau 94.3 %. Realisasi keuangan sebesar 94.3 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 98.34 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, walaupun target sasaran tidak berhasil 100% tercapai,

Perjanjian Kinerja Tahun 2023, berbeda dengan perjanjian kinerja tahun-tahun sebelumnya, karena selain sasaran dan indikator kinerja utama yang tertuang dalam renstra perangkat daerah, juga memuat indikator tambahan. Indikator tambahan dituangkan dalam perjanjian kinerja atas permasalahan yang masih ada dan belum mendapat perhatian, sehingga dengan dimuat dalam perjanjian kinerja, diharapkan permasalahan tersebut mendapat perhatian untuk diselesaikan.

C. Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dapat disampaikan informasi sebagai berikut:

- a) **Perbandingan persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase realisasi atau penyerapan anggaran**



Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata - rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut :

- a) Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.
- b) Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

Hasil analisis persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dan persentase penyerapan anggaran, disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.42. Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2023

No.	Sasaran	% Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan					
2.	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.					
3.	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	98.38	57.896.066.526	54.580.265..037	94.3	Efisien
4.	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabelBarang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

5.	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)					
6.	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah					
7.	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah					
8.	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.					
9.	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang kemiskinan di wilayahnya.					
10.	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan					
11.	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya					
12.	Melaksanakan rewiu awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini					
13.	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"					
14.	Melaksanakan Pengembangan					



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun					
15.	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan					
16.	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan					
17.	Menurunnya Angka Kematian Ibu					
18.	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)					
19.	Meningkatnya Posyandu Aktif					
20.	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah					

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran, dari 6 sasaran menunjukkan tidak efisien, karena kinerja tidak mencapai 100%.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang ada pada Kecamatan Muara Badak dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 98.38 %, adapun realisasi anggaran dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut dibawah ini :



Tabel 3.43. Realisasi Anggaran Tahun 2023

REALISASI ANGGARAN KECAMATAN MUARA BADAK TAHUN 2023

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target	Capaian	% Capaian	Kategori Capaian
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan						
	Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti		70	100	142.86	Sangat Berhasil
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa		95	76.73	80.77	Berhasil
	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan		74	74	100.00	Sangat Berhasil
	Persentase capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum)		71	100	140.85	Sangat Berhasil
Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
	PROGRAM	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,127,702,073	7,069,478,263	86.98	1,058,223,810



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	381,070,000	320,643,818	84.14	60,426,182
	Sub Kegiatan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	286,280,000	263,650,118	92.10	22,629,882
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10,000,000	8,935,900	89.36	1,064,100
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10,000,000	6,241,000	62.41	3,759,000
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9,520,000	9,520,000	100.00	-
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10,270,000	6,585,000	64.12	3,685,000
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55,000,000	25,711,800	46.75	29,288,200
	Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,373,111,140	3,107,095,617	92.11	266,015,523
	Sub Kegiatan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,181,046,240	2,955,980,417	92.92	225,065,823
	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	45,184,900	28,385,200	62.82	16,799,700



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Sub Kegiatan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	146,880,000	122,730,000	83.56	24,150,000
	Kegiatan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	65,800,000	63,405,000	96.36	2,395,000
	Sub Kegiatan	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	25,000,000	22,605,000	90.42	2,395,000
	Sub Kegiatan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	40,800,000	40,800,000	100.00	-
	Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	248,602,792	160,499,526	64.56	88,103,266
	Sub Kegiatan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	50,000,000	48,180,000	96.36	1,820,000
	Sub Kegiatan	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	56,700,000	49,422,000	87.16	7,278,000
	Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	141,902,792	62,897,526	44.32	79,005,266
	Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	575,579,849	528,794,152	91.87	46,785,697
	Sub Kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	5,000,000	100.00	-



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Sub Kegiatan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55,000,000	52,867,000	96.12	2,133,000
	Sub Kegiatan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	99,707,349	88,304,025	88.56	11,403,324
	Sub Kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10,000,000	8,191,700	81.92	1,808,300
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	24,400,000	48.80	25,600,000
	Sub Kegiatan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	274,880,000	274,600,427	99.90	279,573
	Sub Kegiatan	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50,000,000	45,472,000	90.94	4,528,000
	Sub Kegiatan	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	30,992,500	29,959,000	96.67	1,033,500
	Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,933,372,000	1,621,197,000	83.85	312,175,000
	Sub Kegiatan	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan / Jabatan	1,343,900,000	1,087,650,000.00	80.93	256,250,000
	Sub Kegiatan	Pengadaan Mebel	96,000,000	76,180,000.00	79.35	19,820,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Sub Kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	318,472,000	303,040,000.00	95.15	15,432,000
	Sub Kegiatan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175,000,000	154,327,000.00	88.19	20,673,000
	Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	726,151,032	648,700,563	89.33	77,450,469
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,300,000	3,300,000	100.00	-
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	425,282,632	374,825,226	88.14	50,457,406
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,568,400	12,456,928	99.11	111,472
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	285,000,000	258,118,409	90.57	26,881,591
	Kegiatan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	824,015,260	619,142,587	75.14	204,872,673
	Sub Kegiatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	369,689,900	335,416,587	90.73	34,273,313
	Sub Kegiatan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	47,980,000	95.96	2,020,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Sub Kegiatan	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	197,125,360	94,902,000	48.14	102,223,360
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	207,200,000	140,844,000	67.97	66,356,000
	PROGRAM	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,082,081,900	987,792,350	91.29	94,289,550
	Kegiatan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1,082,081,900	987,792,350	91.29	94,289,550
	Sub Kegiatan	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	63,075,000	63,075,000	100.00	-
	Sub Kegiatan	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	83,600,000	70,005,000	83.74	13,595,000
	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	935,406,900	854,712,350	91.37	80,694,550
	PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	48,499,471,303	46,371,394,924	95.61	2,128,076,379



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	50,000,000	0	0	50,000,000
	Sub Kegiatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	50,000,000	0	0	50,000,000
	Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	48,449,471,303	46,371,394,924	95.71	2,078,076,379
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	1,092,081,303	401,244,770	36.74	690,836,533
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	47,357,390,000	45,970,150,154	97.07	1,387,239,846
	PROGRAM	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	44,000,000	38,375,000	87.22	5,625,000
	Kegiatan	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	44,000,000	38,375,000	87.22	5,625,000
	Sub Kegiatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	44,000,000	38,375,000	87	5,625,000



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

	PROGRAM	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50,000,000	45,204,000	90.41	4,796,000
	Kegiatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	50,000,000	45,204,000	90.41	4,796,000
	Sub Kegiatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	50,000,000	45,204,000	90	4,796,000
	PROGRAM	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	92,811,250	68,020,500	73.29	24,790,750
	Kegiatan	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	92,811,250	68,020,500	73.29	24,790,750
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	22,811,250	7,902,500	34.64	14,908,750
	Sub Kegiatan	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	70,000,000	60,118,000	85.88	9,882,000
			57,896,066,526	54,580,265,037	94.27	3,315,801,489



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Badak tahun 2023 merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah serta seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dan dapat sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Penyelenggaraan kegiatan di Kecamatan Muara Badak pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun kelima dari Renstra Kecamatan Muara Badak Tahun 2016-2021. Kecamatan Muara Badak telah dapat merealisasikan pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023.

Tabel 4.1. Hasil Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas dan Jangkuan Pelayanan Publik Kecamatan	1	Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti	Persen	70	100	142.86%	SANGAT BERHASIL
		2	Persentase Capaian Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persen	71	100	140.85%	SANGAT BERHASIL
		3	Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa	Persen	95	76.73	80.77%	BERHASIL
		4	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan	Nilai	74	74	100.00%	SANGAT BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

2	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	5	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK/ Inspektorat pada tahun berjalan maka wajib untuk ditindaklanjuti paling lambat 60 hari kerja	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
3	Melaksanakan dan Melaporkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	6	Persentase Pelaksanaan dan Pelaporan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berada di Pengguna Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
4	Melaksanakan Pengelolaan Pengadaan diskriminatif dan akuntabel Barang dan jasa yang menjadi kewenangannya secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil tidak	7	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
5	Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	8	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
		9	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2023	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
6	Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	10	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	60	66.9	111.50%	SANGAT BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

7	Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	11	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar dan Aplikasi e-Pantau	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	12	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100.00%	SANGAT BERHASIL
9	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang kemiskinan di wilayahnya.	13	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	98.92	98.92%	SANGAT BERHASIL
10	Melaksanakan percepatan realisasi kegiatan fisik dan keuangan	14	Persentase realisasi kegiatan fisik	Persen	100	99	99.00%	SANGAT BERHASIL
		15	Persentase realisasi keuangan	Persen	100	94.35	94.35%	BERHASIL
11	Melaksanakan Manajemen Resiko terhadap program kegiatan di perangkat daerahnya	16	Laporan Penyusunan Manajemen Resiko dan Laporan Pengendalian Manajemen Resiko maksimal 10 Januari	Laporan	2	2	100.00%	SANGAT BERHASIL
12	Melaksanakan revaluasi awal terhadap Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah sesuai dengan data terkini	17	Dokumen Revaluasi Indikator Kinerja Utama	Dokumen	1	1	100.00%	SANGAT BERHASIL
13	Melaksanakan tata kelola Core Values ASN "BerAKHLAK"	18	Jumlah kegiatan sosialisasi, internalisasi, penetapan leader, Tim budaya kerja	Kegiatan	4	3	75.00%	CUKUP BERHASIL
14	Melaksanakan Pengembangan Kompetensi ASN minimal 20 JP per Tahun	19	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Persen	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
15	Meningkatnya Indeks Kesehatan Keluarga di Kecamatan	20	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Angka	0.4	0.29	72.50%	CUKUP BERHASIL



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

16	Terlaksananya koordinasi konvergensi penurunan stunting di Kecamatan	21	Penurunan Prevalensi stunting	Persen	16.5	15.31	92.79%	BERHASIL
17	Menurunnya Angka Kematian Ibu	22	Angka Kematian Ibu (AKI) di kecamatan	Angka	1	4	25%	KURANG BERHASIL
18	Mewujudkan Desa/Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	23	Persentase Desa/Kelurahan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS)	Persen	45	97.17	215.93%	SANGAT BERHASIL
19	Meningkatnya Posyandu Aktif	24	Persentase Posyandu Aktif	Poin	100	100	100.00%	SANGAT BERHASIL
20	Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah	25	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Perkantoran	Poin	100	10	10.00%	KURANG BERHASIL
							98.38%	SANGAT BERHASIL

Berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang dilakukan, capaian indikator kinerja dapat dikategorikan sebagai berikut:

- a) Capaian kinerja $\geq 95\%$ kategori “sangat berhasil” sebanyak 18 Indikator, atau 72 %;
- b) Capaian kinerja 80 s/d $<95\%$ kategori “berhasil” sebanyak 3 Indikator, atau 12 %;
- c) Capaian kinerja 50 s/d $<80\%$ kategori “cukup berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 8 %; dan
- d) Capaian kinerja 0 s/d $< 50\%$ kategori “kurang berhasil” sebanyak 2 Indikator, atau 8 %.



Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
Belanja Operasi	Rp. 53.469.011.392.-	Rp 51.266.140.037,-	95.88%
Belanja Modal	Rp. 4.427.055.134.-	Rp. 3.359.245.000,-	75.88 %
Total	Rp. 57.896.066.526.-	Rp. 54.624.140.037.-	94.35 %

Tabel 4. 2. Rincian Belanja Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi keuangan Tahun 2023 sebesar 994.35 % dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran Tahun 2023 sebesar 98.38 %, maka terjadi efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut, karena target sasaran tidak berhasil 100% tercapai, walaupun penggunaan sumber daya lebih rendah dari capaian kinerja.

Adapun Indikator Kinerja Utama yang tidak bisa mencapai secara maksimal karena beberapa hal :

1. Persentase Keluhan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan Yang Ditindaklanjuti, dengan kuesioner yang diedarkan kepada masyarakat 6.753 respondent sewaktu di Loker Paten, dan semua jenis layanan yang dijadikan Target sampling 442 respondent dimana hasilnya adalah Peningkatan Layanan Paten. Dan untuk tahun 2024 akan menindaklanjuti.
2. Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa dengan capaian 76.73 %, Pemerintah Kecamatan telah memberikan Pembinaan ke Pemerintah Desa dalam kegiatan Peningkatan Pengolahan BUMDES, tapi Pendapatan Asli Desa belum mencapai baik dan Target pertumbuhan dalam Renstra terlalu tinggi dan perlu ada review
3. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kewenangan Kecamatan, Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Rumah Tangga dan Perijinan Skala Kecil sebelumnya masih kewenangan Camat telah alihkan ke DPMPTSP Tenggarong berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pelayanan Terpadu Satu Pintu dan



Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, dan untuk tahun 2024 agar indicator tersebut bisa di review dengan target sasaran 0.

4. Menurunnya Angka Kematian Ibu dengan nilai capain 25 % dengan target Kematian adalah 1, dimana nilai tidak tercapai karena angka kematian adalah 4 kematian Ibu.
5. Mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Perkantoran Pemerintah dengan capaian 10 % dengan target 100 poin, dimana kendalanya belum tersedianya ruangan untuk merokok, karena ruangan yang adan tidak tersedia lagi

Camat Muara Badak
KECAMATAN
MUARA BADAK
KUTAI KARTANEGERA
Nip. 196806121988031007
ARPAN, S.Sos



DATA PRESTASI DAN PENGHARGAAN
KECAMATAN MUARA BADAK
TAHUN 2023

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan, Waktu Penerimaan
1	2	3
1.	Piagam Penghargaan Pemerintah Desa Tanah Datar Atas Kinerjanya dalam penyusunan APB Desa Tahun 2023 melalui Input dan Posting di Aplikasi Siskuedes Online dengan Tepat Waktu	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 06 Februari 2023
2.	Piagam Penghargaan Atas Kontribusi Dan Kepedulianannya Dalam Bidang Pendidikan Di Kabupaten Kukar Dalam Rangka Hari Pendidikan Nasional Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 02 Mei 2023
3.	Piagam Penghargaan Pemerintah Tanah Datar Atas Kinerjanya Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online, Aplikasi Penyaluran Keuangan Desa (PACAR KUDA) Dan Pembayaran Non Tunai Dengan Menggunakan ATKP Desa, Dalam Mendukung KUKARI DAMAN – Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA)	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 13 September 2023
4.	Pelaksanaan Terbaik BBGRM Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
5.	Juara 3 Lomba BBGRM Tingkat Propinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur
6.	Piagam Penghargaan Desa Badak Baru sebagai Desa Stop Buang Air Besar (SBS)	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 12 November 2023
7.	Juara ke III MTQ Tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
8.	Piagam Penghargaan atas Kontribusi dan Kepedulianannya dalam Bidang Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 2 Mei 2023



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kecamatan Muara Badak Tahun 2023

9.	Piagam Penghargaan Desa Badak Baru sebagai Desa Ramah Lingkungan Tahun 2023 Katerogi IDAMAN	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 15 Agustus 2023
10.	Piagam Penghargaan Pemerintah Desa Badak Baru Atas Kinerjanya Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Menggunakan Aplikasi SISKEUDES Online, Aplikasi Penyaluran Keuangan Desa (PACAR KUDA) Dan Pembayaran NonTunai Dengan Menggunakan ATKP Desa, Dalam Mendukung KUKARI DAMAN – Digitalisas iPelayanan Publik (DISAPA)	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 13 September 2023
11.	Piagam Penghargaan Kecamatan Muara Badak sebagai OPD yang memperoleh Kategori BAIK berdasarkan Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2022	Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, 24 Oktober 2023